

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan desa dan kota sudah mulai seimbang dan semakin maju berkat usaha pemerintah dalam meningkatkan pembangunan nasional dan pembangunan daerah baru-baru ini. Ketidakseimbangannya pembangunan antara desa dan kota sangat berpengaruh terhadap masalah pembangunan di Indonesia.<sup>1</sup> Hal ini dapat memicu bertambah tingginya kemiskinan di Indonesia karena antara desa dan kota tidak seimbang yang pada akhirnya pembangunan di desa mengalami ketertinggalan dan terjadi peningkatan kemiskinan.

Terkait dengan masalah kemiskinan, menurut data BPS (September, 2017) jumlah penduduk miskin pada tahun 2012 penduduk kota dengan kemiskinan sebesar 8,60% sedangkan kemiskinan di pedesaan sebesar 14,70 %, dan telah menurun pada tahun 2017 penduduk kota dengan kemiskinan sebesar 7,26% sedangkan kemiskinan di pedesaan sebesar 13,47%. Menanggapi permasalahan tersebut, strategi pemerintah mengatasi ketimpangan pembangunan nasional yaitu dengan

---

<sup>1</sup> Chandra Kusuma Putra, dkk, "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa," *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* 1, no. 6, 1203.

melaksanakan pembangunan nasional yang menaruh perhatian besar terhadap pembangunan wilayah pedesaan.<sup>2</sup>

Awal pelaksanaan otonomi daerah aspek kemandirian terkesan diabaikan, namun dengan seriusnya pemerintah pusat hingga kabupaten melaksanakan tugas otonomi daerah, kepentingan-kepentingan desa mulai diperhatikan. Bukti bahwa pemerintah pusat mulai memberikan titik berat pada prioritas pematapan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan desa tercermin dari semakin banyaknya perangkat peraturan pelaksanaan, yaitu Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) maupun keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri), yang mengatur tentang desa, baik itu PP, Permendagri dan Kepmendagri yang dimaksud merupakan peraturan pelaksanaan pengaturan mengenai desa yang diamanatkan oleh UU No 32 tahun 2004.<sup>3</sup>

Otonomi Daerah sebagaimana dituangkan dalam UU No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah maupun dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat daerah, dimana hal ini disambut positif dari semua pihak dengan segenap harapan bahwa melalui otonomi daerah akan dapat merangsang terhadap adanya upaya untuk menghilangkan praktek-praktek sentralistik yang pada satu sisi dianggap kurang menguntungkan bagi daerah dan penduduk lokal. Prinsip

---

<sup>2</sup> BPS - Statistics Indonesia diakses dari <https://www.bps.go.id/statictable/2014/01/30>, "BPS - Statistics Indonesia," jumlah-penduduk-miskin-persentase-penduduk-miskin-dan-garis-kemiskinan-1970-2017., pada tanggal 18 januari 2018 pukul 12.50 WIB.

<sup>3</sup> J Kaloh, "Mencari Bentuk Otonomi Daerah: Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal Dan Tantangan Global", 186.

otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang.<sup>4</sup>

Proses desentralisasi yang telah berlangsung telah memberikan penyadaran tentang pentingnya kemandirian daerah yang bertumpu pada pemberdayaan potensi lokal. Meskipun pada saat ini kebijakan yang ada masih menitik beratkan otonomi pada tingkat Kabupaten/Kota, namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan ditingkat paling bawah yaitu desa. Pemerintah desa diyakini lebih mampu melihat kebutuhan yang harus lebih di prioritaskan masyarakat dibandingkan Pemerintah kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan lebih luas dan rumit. Untuk itu, pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan pedesaan yang telah ditetapkan.

UU nomor 6 tahun 2014 dengan jelas menyatakan bahwa desa dan desa adat mendapat perlakuan yang sama dari pemerintah dan pemerintah daerah. Dalam hal ini, desa diberikan otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat,

---

<sup>4</sup> Azwardi Sukanto, "Efektifitas Alokasi Dana Desa (Add) Dan Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Selatan," *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 12, no. 1, 29–41.

dan nilai sosial budaya masyarakat desa, serta menetapkan dan mengelola kelembagaan desa.<sup>5</sup>

Bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah dengan adanya anggaran pembangunan dan pemberdayaan secara khusus yang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membangun wilayah pedesaan yakni dalam bentuk Dana Desa (DD). Sejak tahun 2015, pemerintah telah memberikan Dana Desa (selanjutnya akan disebut dengan DD) kepada desa yang bersumber dari APBN yang ditransfer melalui APBD kabupaten/ kota. Desa mempunyai hak untuk mengelola kewenangan dan pendanaannya. Namun, sebagai bagian dari NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) pemerintah desa perlu mendapat supervisi dari level pemerintah di atasnya. Hal ini dikarenakan untuk kedepannya, jumlah DD yang akan diberikan ke desa akan semakin besar sementara kapasitas dan kapabilitas SDM (Sumber Daya Manusia) dalam pengelolaan keuangan desa masih belum cukup memadai. Selain itu, keterlibatan masyarakat untuk merencanakan dan mengawasi penggunaan dana desa masih dirasakan minimal.

Berdasarkan pada Peraturan Bupati Mojokerto no 3 tahun 2018 Tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa tahun anggaran 2018 yang telah berpedoman pada peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 pasal 12 ayat 1 tentang Dana Desa yang bersumber

---

<sup>5</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tentang Desa Tahun 2014 Pasal 1.

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pada ayat pasal yang telah diamandemen pada Peraturan Pemerintah Nomor 168 tahun 2014 ke 11 ayat 2 yang menyatakan bahwa dana desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan: Alokasi dasar, Alokasi afirmasi dan Alokasi Formula (Alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota).<sup>6</sup>

Berkenaan dengan desentralisasi/otonomi maksud pemberian Dana Desa (DD) adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program Pemerintah Desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Melihat pada apa yang diamanatkan melalui dana desa ini, program pembangunan dan pemberdayaanlah yang memang menjadi prioritas utamanya, dan peran pemerintah desa dalam hal ini menjadi kunci dalam mengalokasikan dana tersebut dengan semestinya, yakni untuk pembangunan dan pemberdayaan.

Pemberdayaan dapat diartikan upaya yang ditujukan agar suatu tatanan dapat mencapai suatu kondisi yang memungkinkan untuk membangun dirinya sendiri. Tujuan pemberdayaan masyarakat pada dasarnya adalah membantu pengembangan manusiawi yang otentik dan integral dari masyarakat yang lemah, miskin, marginal dan kaum kecil dan

---

<sup>6</sup> Peraturan Bupati Mojokerto No.3 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Rincian Dana Desa Setiap Desa Pasal 2.

memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat tersebut secara sosio ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup.<sup>7</sup>

Arah pemberdayaan masyarakat desa yang paling efektif dan lebih cepat untuk mencapai tujuan adalah dengan melibatkan masyarakat (masyarakat umum, masyarakat kurang mampu) dan unsur pemerintahan yang memang menggunakan kebijakan pembangunan yang lebih reaktif memberikan prioritas kebutuhan masyarakat desa dalam alokasi anggaran. Pembangunan desa dengan pemberdayaan masyarakat langsung memiliki hasil yang lebih efektif dan efisiensi dibandingkan dengan pembangunan desa dengan menggunakan tenaga proyek ataupun pekerja dari desa lain. Salah satu pola pendekatan pemberdayaan masyarakat paling efektif dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat adalah merangsang masyarakat untuk mampu mengidentifikasi keinginan dan kebutuhan bekerja secara kooperatif dan menumbuhkan rasa gotong-royong sesama warga desa.

Pemberdayaan dalam kajian pengembangan masyarakat Islam adalah sebuah pembelajaran kepada masyarakat agar dapat mandiri melakukan upaya perbaikan kualitas hidup yang menyangkut tentang kesejahteraan dan keselamatan dunia dan akhirat.<sup>8</sup> Salah satu pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam Islam perlunya diterapkan adalah karena dengan adanya pemberdayaan akan menghasilkan pembangunan yang

---

<sup>7</sup> Edi Suharto, *Pembangunan, Kebijakan Sosial Dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran* (Bandung: Lembaga Studi Pembangunan STKS, 1997), 210.

<sup>8</sup> Mutthoriq, dkk, "Aktualisasi Nilai Islam Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir," *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* 2, no. 3, 426–433.

berkelanjutan. Dengan hal seperti ini maka akan terus dapat memperbaiki taraf hidupnya ke yang lebih baik. Dalam agama Islam memiliki konsep pemberdayaan masyarakat dalam kitab suci yaitu Al-qur'an Q.S Ar-Ra'd ayat 11:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

Artinya: “Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan kemunduran yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya”.<sup>9</sup>

Berdasarkan surat Ar-Ra'd ayat 11 yang menyebutkan bahwa Allah tidak akan merubah keadaan mereka, selama mereka tidak merubah sebab-sebab kemunduran mereka. Sejalan dengan teori pemberdayaan masyarakat yang mana melalui pemberdayaan masyarakat dapat memiliki inisiatif dan kemampuan untuk mengelola sendiri sumber daya mereka. Sehingga dengan mereka dapat mengelola dan membentuk penggalan kemampuan pribadi, kreatifitas, kompetensi dan daya pikir dapat merubah kehidupannya pula dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki.

Contoh pemberdayaan di bidang keagamaan di desa Kemiri salah satunya yaitu :

1. Pelatihan merawat jenazah

<sup>9</sup> Departemen Agama RI Al-Qur'an dan terjemahnya, *Q.S: Ar-Ra'd (13) Ayat 11* (Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2005), 368.

2. Pelatihan kesenian tradisional islami untuk anak-anak tpq dan remaja seperti rabana, kesenian hadrah, dibaan dll
3. Peningkatan kapasitas guru TPQ
4. Pengiriman Kontingen lomba Al-Qur'an ke kecamatan bahkan kabupaten untuk anak berprestasi
5. Rehabilitasi dan pembangunan TPQ di desa Kemiri
6. Peringatan maulid nabi Muhammad SAW.

Pemberdayaan dalam bidang keagamaan sudah dilakukan oleh pemerintah desa Kemiri terutama setelah adanya dana desa pertama kali di gulirkan tahun 2015, kegiatan pemberdayaan bidang keagamaan lebih di prioritaskan dikarenakan sangat penting untuk meningkatkan mutu dan kualitas ahlak akan pendidikan keagamaan di desa Kemiri.

Program pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi juga telah di lakukan oleh pemerintah desa kemiri. Program ini mencakup pemberdayaan UKM, industri rumah tangga, BUMDes, kelompok tani, pasar, serta penunjang ekonomi masyarakat lainnya. Bentuk program pemberdayaan ini dapat berupa pelatihan, workshop, pemodalan/permodalan, bantuan alat produksi, peningkatan sarana/prasarana dan lain-lain. Dengan adanya pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat desa Kemiri.

Desa Kemiri pada tahun 2016 memperoleh dana desa sebesar Rp. 622.543.000 yang di anggarkan untuk bidang pembangunan dan

pemberdayaan dan pada tahun 2017 desa Kemiri memperoleh dana desa sebesar Rp.793.919.000, meningkat dari tahun sebelumnya. Dan pada tahun 2018 sebesar Rp. 673.151.000.

Dana desa merupakan salah satu alat untuk membantu terlaksananya pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat. Dengan adanya dana desa ini, diharapkan agar dapat membantu masyarakat dalam segi kebutuhan, pembangunan sarana dan prasarana, serta dapat mengembangkan potensi ekonomi lokal yang didasarkan atas kondisi dan potensi desa. Namun, dalam pelaksanaan penggunaan dana desa masih dirasakan belum optimal dikarenakan belum memadainya kapasitas dan kapabilitas pemerintah desa dan belum terlibatnya peran serta masyarakat secara aktif dalam pengelolaan program dana desa.

Berdasarkan dari fenomena diatas, maka fokus utama dalam penelitian ini adalah melihat bagaimana partisipasi dan respon masyarakat desa Kemiri dalam pelaksanaan program pemberdayaan melalui dana desa, bagaimana pemberdayaan masyarakat sebelum dan sesudah adanya dana desa, bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah desa kemiri dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat dengan adanya program dana desa, dan bagaimanakah pemberdayaan masyarakat dalam perspektif Ekonomi Islam? Oleh karena itu Penulis mengangkat masalah tersebut kedalam skripsi yang berjudul “ Strategi Optimalisasi Program Dana Desa

melalui Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Kemiri Kec. Pacet Kab. Mojokerto).

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Dana desa merupakan amanah dari pemerintah pusat kepada pemerintah desa untuk dimanfaatkan sebaik mungkin dan bisa dipertanggungjawabkan dengan tata kelola yang sudah ada.
2. Perangkat desa dituntut untuk memiliki tanggungjawab yang besar karena pemberian dana ke desa yang begitu besar, jumlah pelaporan yang beragam serta adanya titik kritis dalam pengelolaan keuangan desa.
3. Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparan, akuntabel, dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran untuk mewujudkan tata kelola yang baik
4. Begitu besar peran yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggungjawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan.

5. Belum optimalnya program dana desa terutama dalam pemberdayaan masyarakat dalam perspektif ekonomi Islam.
6. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan untuk program kegiatan Dana desa, mengakibatkan kesalahan dalam prioritas pendanaan karena dengan adanya kontrol masyarakat maka penggunaan anggaran dana desa dapat digunakan sesuai kebutuhan dan keperluan pembangunan.

### **C. Batasan Masalah**

Beberapa masalah yang dapat diidentifikasi, maka penulis membatasi terhadap permasalahan tentang Strategi Optimalisasi Program Dana Desa melalui Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Kemiri Kec. Pacet Kab. Mojokerto) agar pembahasan lebih terfokus, yaitu:

1. Pemberdayaan masyarakat Desa Kemiri sebelum adanya dana desa dan sesudah adanya dana desa
2. Strategi Optimalisasi Program Dana Desa melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemiri Kec. Pacet Kab. Mojokerto
3. Partisipasi dan respon masyarakat Desa Kemiri dalam pelaksanaan program pemberdayaan melalui dana desa
4. Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif Ekonomi Islam

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan indikator masalah di atas, maka penulis merumuskan beberapa masalah, yaitu:

1. Bagaimana pemberdayaan masyarakat Desa Kemiri sebelum dan sesudah adanya dana desa?
2. Bagaimana upaya dan strategi pemerintah Desa Kemiri dalam mengoptimalisasikan program dana desa melalui pemberdayaan masyarakat ?
3. Bagaimana partisipasi dan respon masyarakat Desa Kemiri dalam pelaksanaan program pemberdayaan melalui dana desa?
4. Bagaimana Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif Ekonomi Islam?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pemberdayaan masyarakat desa Kemiri sebelum dan sesudah adanya dana desa.
2. Untuk mengetahui upaya dan strategi yang dilakukan oleh pemerintah desa Kemiri dalam mengoptimalisasikan pemberdayaan masyarakat desa melalui program dana desa.
3. Untuk mengetahui partisipasi dan respon masyarakat desa Kemiri dalam pelaksanaan program pemberdayaan melalui dana desa.
4. Mengetahui pemberdayaan masyarakat dalam perspektif Ekonomi Islam.

## **F. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan dan menjadi fokus kajian serta tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis, Diharapkan dari penyusunan penelitian ini, dapat memberikan sumbangan konsep serta menambah pengetahuan dan wawasan terhadap kajian sosiologi. Selain itu juga diharapkan mampu menambah khasanah pembelajaran dan bahan masukan bagi penelitian lebih lanjut dengan topik yang sama.
2. Kegunaan sosial atau kegunaan praktis. Diharapkan dengan penyusunan penelitian ini, dapat memberikan sebuah pemahaman khususnya kepada masyarakat sekitar akan pentingnya peran pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat, serta bagaimana seharusnya upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat, terlebih dalam mengoptimalkan adanya program dana desa.

## **G. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka dalam penelitian ini, pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran permasalahan yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, sehingga diharapkan tidak adanya pengulangan materi penelitian secara

mutlak. setidaknya ada karya tulis yang sedikit berhubungan dengan kasus yang hendak penulis teliti, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Putra<sup>10</sup>: Pengelolaan Dana Desa Dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Study Kasus Di Desa Sindon Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali). Perbedaan Penelitian Penulis dengan penelitian sebelumnya yaitu Penulis lebih mengacu pada upaya pemerintah desa dalam mengoptimalkan program dana desa melalui pemberdayaan masyarakat dan bagaimana partisipasi masyarakat dengan adanya program dana desa. Penulis juga ingin mengetahui lebih dalam tentang pemberdayaan masyarakat sebelum dan sesudah adanya dana desa serta pemberdayaan masyarakat dalam perspektif Ekonomi Islam itu seperti apa. Perbedaan yang paling mendasar yaitu latar penelitian penulis berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Latar penelitian penulis bertempat di Desa Kemiri Kec. Pacet Kab. Mojokerto yang sebelumnya belum pernah dilakukan penelitian mengenai dana desa.
2. Wulandari<sup>11</sup>: Pelaksanaan Program Alokasi Dana Desa (DANA DESA) 2016 Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Dalam

---

<sup>10</sup> Mirza Iskandar Putra, "Pengelolaan Dana Desa Dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Study Kasus Di Desa Sindon Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali)" (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017) diakses melalui <http://eprints.ums.ac.id/56520/>, pada 2 Desember 2018, Pukul 16.56 WIB.

<sup>11</sup> Anita Wulandari, "Pelaksanaan Program Alokasi Dana Desa (ADD) 2016 Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran)" (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017) diakses melalui <http://Repository.Radenintan.Ac.Id/1510/>, pada 1 Desember 2018, Pukul 17.00 WIB.

Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran).

Perbedaan Penelitian Penulis dengan penelitian sebelumnya yaitu Penulis lebih meneliti tentang program dana desa bukan alokasi dana desa. Latar penelitian penulis di desa Kemiri kec. Pacet kab. Mojokerto. Disini peneliti lebih meneliti tentang Strategi optimalisasi program dana desa dalam pemberdayaan masyarakat yang mana berdasarkan penelitian yang penulis lakukan sebelumnya program dana desa yang berjalan di desa Kemiri dirasa belum optimal terutama dalam bidang pemberdayaan. Penulis juga ingin meneliti upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam mengoptimalkan program dana desa serta partisipasi masyarakat desa Kemiri dengan adanya program dana desa. Dan penulis ingin meneliti seperti apa pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan perspektif Ekonomi Islam.

3. Nova Sulastri<sup>12</sup> : Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam meningkatkan pembangunan fisik desa lakopodo kecamatan watopute kabupaten Muna. Perbedaan Penelitian Penulis dengan penelitian sebelumnya yaitu Penulis lebih meneliti tentang Program Dana desa bukan Alokasi dana desa. Latar penelitian penulis di desa Kemiri kec. Pacet kab. Mojokerto. Disini peneliti lebih meneliti tentang Strategi optimalisasi program dana desa dalam pemberdayaan masyarakat yang mana berdasarkan penelitian yang penulis lakukan

---

<sup>12</sup> Nova Sulastri, “Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Lakopodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna” (Universitas Halu Oleo Kendari, 2016).

sebelumnya program dana desa yang berjalan di desa Kemiri dirasa belum optimal terutama dalam bidang pemberdayaan. Penulis juga ingin meneliti upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam mengoptimalkan program dana desa serta partisipasi masyarakat desa Kemiri dengan adanya program dana desa. Dan penulis ingin meneliti seperti apa pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan perspektif Ekonomi Islam. Perbedaan yang mendasar yaitu perubahan permendagri bahwa alokasi dana desa pada tahun 2019 di prioritaskan bukan untuk bidang pembangunan melainkan untuk kegiatan bidang pemerintahan dan pembinaan. Kegiatan pembangunan boleh didanai dengan dana desa.

#### **H. Definisi Operasional**

Definisi operasional variabel adalah pengertian variabel (yang diungkap dalam definisi konsep) tersebut, secara operasional, secara praktik, secara riil, secara nyata dalam lingkup obyek penelitian/obyek yang diteliti. Definisi Operasional Penelitian ini berjudul, Strategi Optimalisasi Program Dana desa melalui Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam studi kasus di Desa Kemiri Kec. Pacet Kab. Mojokerto, dalam definisi operasional ini perlu dipaparkan makna dari konsep atau variabel penelitian sehingga dapat dijadikan acuan dalam menelusuri, mengkaji atau mengukur variabel penelitian, yakni :

## 1. Strategi

Strategi berasal dari bahasa Inggris “strategy” yang berarti ilmu siasat.<sup>13</sup> Strategi adalah proses perencanaan, pengarahan, pengorganisasian dan pengendalian berbagai keputusan dan tindakan strategis dengan tujuan untuk mencapai keunggulan kompetitif.<sup>14</sup>

## 2. Optimalisasi

Optimal di definisikan sebagai sesuatu terbaik, tertinggi, paling menguntungkan.<sup>15</sup> Optimalisasi adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien.<sup>16</sup> Optimalisasi banyak juga diartikan sebagai ukuran dimana semua kebutuhan dapat dipenuhi dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Sedangkan menurut Winardi Optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan<sup>17</sup> sedangkan jika dipandang dari sudut usaha, optimalisasi adalah usaha untuk memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau yang dikehendaki. Dari uraian tersebut diketahui bahwa optimalisasi hanya dapat diwujudkan apabila dalam pewujudannya secara efektif dan efisien. Dalam penyelenggaraan organisasi, senantiasa tujuan diarahkan untuk mencapai hasil secara efektif dan efisien agar optimal. Dari pengertian

<sup>13</sup> John M dan Hasan Sadily Echols, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1990), 56.

<sup>14</sup> ismail Solihin, *Manajemen Strategi* (Jakarta: Gramedia, 2012), 64.

<sup>15</sup> M. A Ali, “Analisis Optimalisasi Pelayanan Konsumen Berdasarkan Teori Antrian Pada Kaltimgps.Com Di Samarinda,” *Ejournal Ilmu Administrasi Bisnis*, 2014.

<sup>16</sup> Partanto dan M dahlan, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Apolo, 1994), 545.

<sup>17</sup> Boyke Richrd, “Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Di Kawasan Perbatasan,” *Ilmu Pemerintahan FISIP Unsrat*, 2016.

optimalisasi di atas, maka yang penulis maksudkan adalah mengoptimalkan program dana desa melalui pemberdayaan masyarakat ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam.

### 3. Program

Program adalah rancangan mengenai asas atau usaha yang akan dijalankan. Program dibuat agar rancangan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

### 4. Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.<sup>18</sup>

### 5. Pemberdayaan masyarakat

Pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok dan masyarakat luas agar memiliki kemampuan dan dapat mengontrol lingkungannya.<sup>19</sup>

<sup>18</sup> A Saibani, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Jakarta: Media Pustaka, 2015), 4.

<sup>19</sup> Aprilia Theresia, dkk, *Pembangunan Berbasis Masyarakat* (Bandung: Alfabeta, 2014), 117.

Pemberdayaan dapat diartikan sebagai pemberi daya (*empowerment*).<sup>20</sup>

Definisi operasional variabel merupakan penjelasan dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian terhadap indikator-indikator yang membentuknya. Definisi operasional penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1. 1 Definisi Operasional Penelitian

Variabel	Definisi	Indikator
Strategi optimalisasi program dana desa	suatu proses penentuan rencana untuk mengoptimalkan program dana desa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. pemerintah desa Kemiri harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya</li> <li>2. keterlibatan masyarakat desa Kemiri secara langsung dalam perencanaan dan pengawasan program Dana desa</li> <li>3. Pemerintah harus dapat mempertanggungjawabkan anggaran prrogram dana desa dengan baik</li> </ol>
Pemberdayaan masyarakat	Usaha untuk memberikan pengetahuan, ketrampilan dan wawasan kepada masarakat agar dapat mengembangkan potensi yang dimiliki	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan SDM masyarakat desa Kemiri dan pengembangan karir melalui program Dana desa</li> <li>2. Pengembangan sarana dan prasarana yang melibatkan masyarakat desa Kemiri</li> <li>3. Pengembangan jejaring kemitraan melalui program dana desa</li> <li>4. Pengembangan usaha BUMDES Kemiri</li> </ol>

<sup>20</sup> Theresia, dkk, *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, 115.